

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

TAHUN 2014





KATA PENGANTAR

Memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 355A/SEK/KU.01/11/2014, tanggal 28 Nopember 2014 Perihal Penyampaian LAKIP Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015, telah disusun Dokumen Penetapan Kinerja (PKT) Tahun 2015 dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun dokumen lainnya, yaitu Dokumen Rencana Kinerja (RKT) 2016 disusun sebagaimana diatur dalam Permen PAN dan RB Nomor 20 tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

Seperti diketahui bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagaimana terurai dalam DIPA Tahun 2014 terdapat 2 (dua) program yaitu:

- a) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;
- b) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Dengan adanya Program-program yang berfungsi untuk mencapai Visi dan Misi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengacu dari pada Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dan Mahkamah Agung RI, maka Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berupaya untuk menyusun Indikator Kinerja Utama yang nantinya akan berfungsi untuk perencanaan dan evaluasi sesuai dengan Perencanaan Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Periode 2014-2019. Salah satu bentuk pengevaluasi Rencana Kerja Tahunan yang merupakan penjabaran dari RENSTRA adalah LAKIP Tahun 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Semoga dengan adanya LAKIP ini memberikan semangat untuk terus mencapai kinerja yang maksimal demi terwujudnya Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik



Indonesia umumnya dan visi dan misi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun khususnya. Kami berharap agar LAKIP 2014 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Semoga Allah, SWT Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan bimbingan kepada kita semua, khususnya Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam mewujudkan visi misinya dan tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut serta membantu penyusunan laporan ini.

Pangkalan Bun, 2 Januari 2015
Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun,

PUTUT TRI SUNARKO, SH., MH.
NIP. 19680318 199212 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar isi

IKHITISAR EKSEKUTIF	1
BAB I. PENDAHULUAN	5
1. Latar Belakang	5
2. Tugas Pokok dan Fungsi	7
3. Aspek Strategis Organisasi	9
4. Struktur Organisasi	14
5. Sistematis LAKIP Tahun 2014.....	15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	17
1. Rencana Strategis 2010 - 2014	17
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2014	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
1. Pengukuran Kinerja	27
2. Analisis Akuntabilitas Kinerja	28
BAB IV PENUTUP	36
1. Kesimpulan	36
2. Saran	37



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban dan perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pengadilan serta agar mampu eksis dalam lingkungan yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Bagi manajemen yang berorientasi pada hasil, perencanaan strategis merupakan hal penting. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah berupaya untuk mendefinisikan apa yang akan dicapai oleh organisasi, mengidentifikasi strategi, memperjelas prioritas organisasi dan bagaimana cara mencapai hasil tersebut. Dengan kata lain, perencanaan strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Bun ini disusun dalam rangka pemenuhan tugas pokok dalam fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri.



Akhirnya, LAKIP Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tahun 2014 ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dalam:

- a) Penyusunan rencana kinerja;
- b) Penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- c) Menyusun penetapan kinerja;
- d) Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan di lingkungan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Dengan adanya pemberian tunjangan remunerasi berbasis kinerja telah mendorong Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan efisiensi dan efektivitas pengadilan dalam melaksanakan Tugas, Pokok dan Fungsi penyelenggaraan peradilan yang bersih, berwibawa, mandiri dan transparan kepada publik atau masyarakat khususnya pencari keadilan (client service). Hal tersebut diupayakan dengan manajemen sumber daya manusia yang ada dan memanfaatkan teknologi informasi menuju terwujudnya salah satu prioritas reformasi yudisial Mahkamah Agung RI yaitu transparansi, akuntabilitas, dan akses terhadap informasi peradilan yang harus ditangani secara sistematis dan berkelanjutan.

Tugas Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagai salah satu Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman dan sebagai Vaorpost Mahkamah Agung RI adalah Menerima, Memeriksa, Memutus, dan Menyelesaikan perkara pada tingkat pertama baik perkara pidana maupun perdata, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang – undang Nomor 49 Tahun 2009 jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum beserta Penjelasannya yang



meliputi penyelesaian sengketa pidana dan perdata.

Mengingat pentingnya pelaksanaan tugas pengadilan yang efektif dan efisien, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menyusun LAKIP dengan upaya dan langkah sebagai berikut:

1. Analisis Tugas Kepegawaian dan Mengadakan Peningkatan Kualitas kepegawaian/SDM yang ada, guna mengembangkan dan melaksanakan sistem manajemen kepegawaian yang berbasis kinerja dengan dukungan pembinaan, pelatihan, studi banding dan kegiatan yang dapat memberikan nilai plus wawasan SDM.
2. Efisiensi ketatalaksanaan, sebagai upaya menyempurnakan sistem tata-laksana penyelenggaraan manajemen dan administrasi guna terciptanya efisiensi dan efektivitas tata hubungan kerja dan kewenangan dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi, dengan mengembangkan program antara lain: penyederhanaan sistem dan prosedur kerja yang dituangkan dalam uraian tugas (Job Description), penyempurnaan administrasi perkantoran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan penyempurnaan sistem pengelolaan sarana dan prasarana kerja, penataan dan pengembangan sistem kearsipan dan perpustakaan yang tertib dan teratur. Pengembangan program tersebut diwujudkan dengan diterapkannya Standart Operating Procedure (SOP) padasemua sistem pengelolaan administrasi peradilan baik administrasi perkara maupun administrasi umum.
3. Peningkatan akuntabilitas, dalam mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan penggunaan sumber daya, dimana dalam pelaksanaannya perlu



disusun dan dikembangkan suatu standard kriteria penilaian akuntabilitas. Yang selanjutnya kinerja tersebut dilakukan penilaian dan evaluasi.

4. Peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagai upaya mewujudkan manajemen pelayanan prima, dalam pengertian produk pelayanan yang cepat, tepat, pasti, efisien, transparan, akuntabel, dan biaya murah bagi masyarakat, dengan mengupayakan penataan, antara lain: pengembangan Sistem Informasi Peradilan dengan mengembangkan website Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan maksud sebagai akses informasi publik yang lebih efektif, efisien dan transparan.
5. Peningkatan sistem pengawasan, melalui upaya mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan berjenjang dalam setiap unit kerja melalui pengawasan melekat (waskat).
6. Optimalisasi koordinasi program Pengadilan, dilakukan koordinasi penyusunan program masing-masing unit kerja dalam satuan kerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebelum diusulkan menjadi bahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) melalui Rapat Koordinasi pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.



BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagai salah satu badan yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain baik di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sendiri maupun di lingkup wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau.

Prinsip Independensi peradilan merupakan prinsip penting dalam negara demokrasi. Prinsip tersebut menghendaki agar lembaga peradilan terbebas dari campur tangan, tekanan atau paksaan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan maupun lembaga lain serta pihak-pihak lain diluar peradilan. Prinsip independen ini merupakan salah satu komponen utama dalam sebuah negara hukum. Karena itulah beberapa instrumen hukum internasional secara khusus mengatur mengenai pentingnya peradilan yang independen, antara lain Universal declaration of Human Right (Pasal 10), International Covenant On Civil and Political Right (pasal 14), International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence.

Konsep independen ini menghendaki bahwa tidak ada campur tangan lembaga eksekutif atau departemen dalam mengelola pengadilan, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No.04 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang ditegaskan dalam kalimat "Kekuasaan Kahakiman adalah kekuasaan negara



yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Dengan demikian di dalam menyelenggarakan peradilan termasuk didalamnya Pembentukan Pengadilan dan Peningkatan klas Pengadilan menjadi wewenang dan tanggung jawab Mahkamah Agung sebagaimana Keppres No.21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, Administrasi dan finansial Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Negeri / Pengadilan Agama / mahkamah Syar'iyah / Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten / kota (Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No.08 tahun 2004, Pasal 6 (1) undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989), kecuali ditentukan lain (penjelasan pasal). Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran dibentuk dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, tentang Peradilan Militer dan Keputusan Panglima TNI, Nomor. Kep/6/X/2003, tanggal 20 Oktober 2003 tentang nama, tempat, kedudukan, daerah hukum Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Pertempuran serta Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi dan Oditurat Militer Pertempuran.

Dalam hal Pelaksanaan program pemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan disertai dengan perwujudan



sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan akuntabilitas mutlak diperlukan. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan keinginan yang nyata dari pemerintah untuk melaksanakan good governance dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Salah satu unsur pokok dari penjabaran sistem akuntabilitas adalah penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat (LAKIP) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara lebih terencana dan terstruktur. Suatu perencanaan yang tidak strategis sama halnya merencanakan suatu kegagalan yang tentunya hal tersebut tidak dikehendaki bersama.

2. Tugas Pokok dan

Fungsi a. Tugas Pokok

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagai salah satu lembaga peradilan tingkat pertama dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan sekaligus sebagai kawal depan Mahkamah Agung mempunyai rencana kerja, program kerja, dan kalender kerja yang merupakan penjabaran umum dalam rangka kerja periodik dengan berpedoman pada Buku I dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan yang disusun oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, maupun keputusan-keputusan yang berkaitan dengan tugas kerja jajaran Peradilan Umum disesuaikan dengan kondisi setempat.



Kedudukan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun secara organisatoris, administratif dan finansial serta teknis yudisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, sesuai ketentuan pasal 13 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo KEPPRES No. 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung dan UU No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum jo Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009.

Tugas Pokok Pengadilan Negeri sebagai salah satu Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman adalah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan di tingkat pertama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum beserta Penjelasannya.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

- 1) Fungsi Mengadili (judicial power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri tingkat pertama dalam wilayah hukumnya,



- 2) Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
- 3) Fungsi Pengelolaan Barang Milik Negara, yakni menyelenggarakan administrasi pengelolaan Barang Milik Negara yang ada pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun,
- 4) Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan internal Pengadilan Negeri Pangkalan Bun atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di daerah hukumnya, serta pengawasan dalam hal fungsi kesekretariatan serta pembangunan.
- 5) Fungsi Penyampaian, yakni penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah.
- 6) Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

3. Aspek Strategis Organisasi

Dasar dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun



sebagai kawal depan Mahkamah Agung memiliki peran untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Untuk memenuhi Pelayanan kepada masyarakat ini diperlukan suatu sistem keterbukaan informasi di lembaga Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya. Untuk hal tersebut Ketua Mahkamah Agung telah menggariskan suatu Keputusan tentang Keterbukaan Informasi di Peradilan berdasarkan SK Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 yang kemudian diubah dengan SEMA Nomor 06 Tahun 2010 dan SK Nomor 01-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Dalam hal keterbukaan informasi ini, Mahkamah Agung telah melakukan kebijakan progresif yang belum banyak dilakukan oleh lembaga negara atau lembaga publik lainnya. Keputusan tersebut bahkan ditetapkan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Adapun informasi publik yang bersumber dari badan publik telah puladikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dasar filosofis lahirnya undang-undang ini, antara lain:

1. Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
2. Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
3. Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;



4. Bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Undang-undang ini secara garis besar memuat hal-hal sebagai berikut: ketentuan umum, asas dan tujuan, hak dan kewajiban pemohon/pengguna informasi dan badan publik, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, informasi yang dikecualikan, mekanisme memperoleh informasi, komisi informasi, ketentuan pidana dan lain-lain. Dalam ketentuan umumnya dirumuskan bahwa yang dimaksud informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Adapun informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk memastikan terlaksananya undang-undang keterbukaan informasi dan surat keputusan tersebut, Mahkamah Agung juga telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi di Lingkungan Peradilan. Selain itu untuk meningkatkan SDM aparatur pengadilan, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2011 tentang tentang Dokumen Elektronik



Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Demikian pula mengenai pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, maka diperlukan alokasi dana untuk dapat memberi kelancaran bagi pelaksanaannya. Alokasi dana pada tahun 2014 berasal dari APBN yaitu sebesar Rp.3.567.146.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) yang dibagi 2 DIPA, yaitu : DIPA 01. Badan Administrasi Umum MARI Rp. 3.531.226.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) dan DIPA 03. Dirjen Badilum MARI Rp. 45.920.000,- (Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).



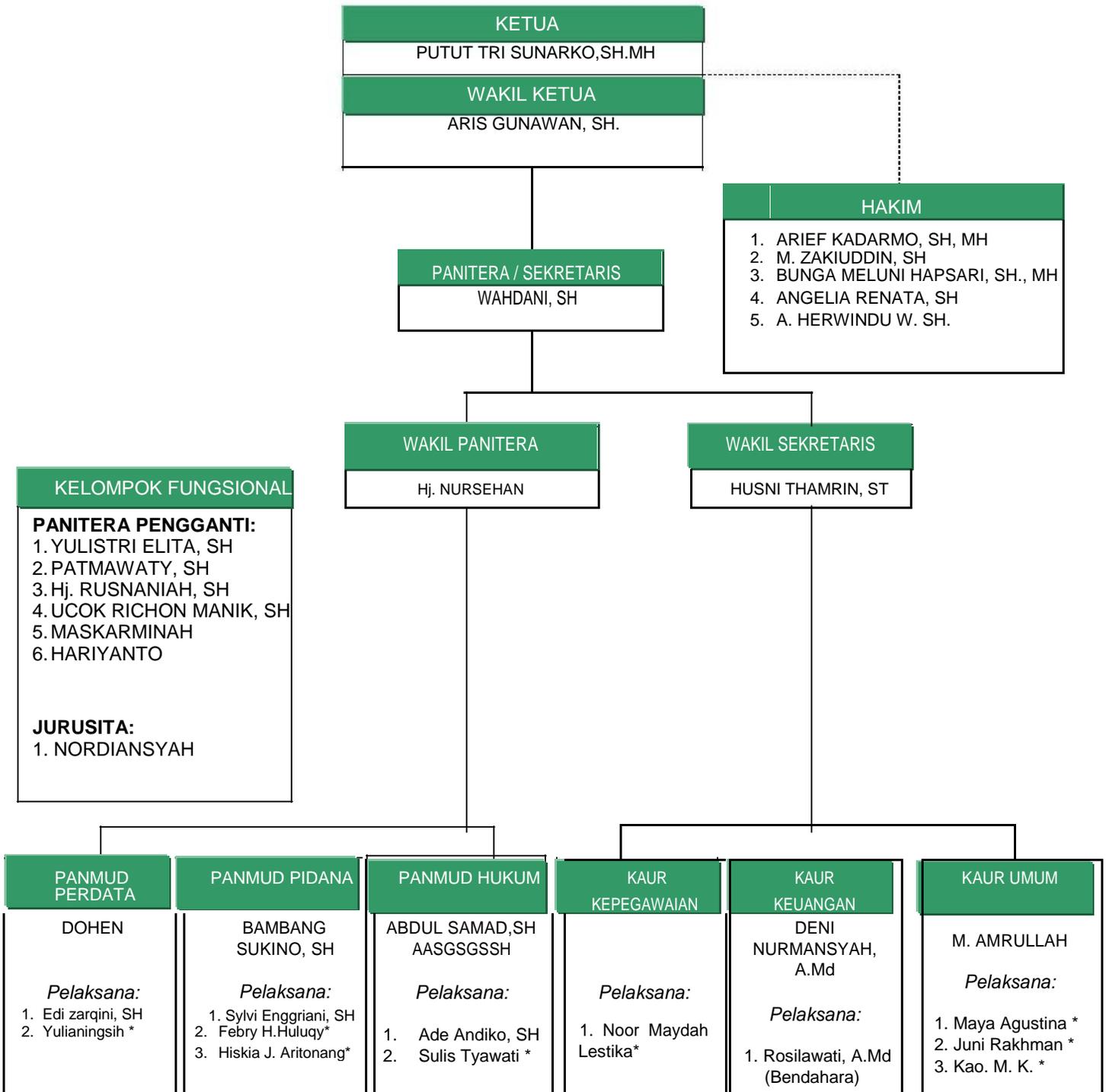
4. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mempunyai peran yang strategis untuk menciptakan supremasi hukum yang mandiri, efektif, efisien serta mendapat kepercayaan publik, profesional dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi ini, diperlukan kerja organisasi yang terstruktur dan berjenjang dalam pelaksanaan tugas. Sesuai UU nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun terdiri dari:

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Hakim
4. Panitera / Sekretaris
5. Wakil Panitera dan Wakil Sekretaris
6. Panitera Muda dan Kepala Urusan
7. Panitera Pengganti
8. Juru Sita
9. Pelaksana



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN



Keterangan : * = Tenaga Honorer



5. Sistematika LAKIP tahun 2014

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan Pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun selama tahun 2014 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. LAKIP ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan penyusunannya berpedoman kepada Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menggambarkan secara ringkas mengenai latar belakang, aspek strategi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Struktur Organisasi;

Bab II Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja

Menjelaskan rencana strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tahun 2010-2014, Penetapan Kinerja tahun 2014 dan Rencana Kinerja Tahun 2015.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2014 berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2014.



Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2014, saran dan harapan yang ingin dicapai untuk tahun mendatang.



BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

1. Rencana Strategis 2010-2014

Dalam rangka memberikan arah pencapaian sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan aparatur peradilan guna tercapainya visi Mahkamah Agung RI maka diperlukan rencana strategis dalam 5 (lima) tahunan. Rencana strategis ini hakekatnya merupakan pernyataan komitmen pencapaian kinerja badan peradilan khususnya Pengadilan Negeri Pangkalan Bun secara sistematis, bertahap dan berkelanjutan hingga terwujudnya visi Mahkamah Agung RI.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tahun 2015-2019 bertujuan untuk menjawab tuntutan pelayanan bagi pencari keadilan dan menciptakan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang bermartabat, transparan, akuntabel dan berbasis teknologi informasi. Untuk itu ditetapkanlah rencana strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan sasaran sebagai berikut:

1. Terciptanya peningkatan penyelesaian perkara;
2. Terciptanya peningkatan tertib administrasi perkara;
3. Terciptanya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM);
4. Terciptanya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice);
5. Terciptanya peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.



a) Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Sejalan dengan tujuan dan keinginan sebagaimana telah diuraikan dalam kebijaksanaan umum peradilan yang ada di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagaimana diuraikan dalam Blueprint Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang merupakan sebuah pedoman/arah pendekatan yang akan ditempuh dalam mewujudkan visi Mahkamah Agung RI :

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG “ Misi Mahkamah Agung RI, yaitu :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Untuk mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung RI tersebut maka Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menselaraskan diri dengan arah capaian tersebut dan membentuk visi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dapat dirumuskan sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN YANG BERMARTABAT, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI”



Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, yaitu:

1. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak, kredibel dan transparan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau, biaya rendah dan memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan.
3. Meningkatkan profesionalisme aparatur peradilan melalui pembinaan mental, spiritual, jasmani dan keahlian sesuai bidang pekerjaan masing-masing.
4. Membangun keselarasan antara SDM dengan sarana prasarana teknologi informasi dalam menjawab kebutuhan informasi peradilan yang dinamis.

b) Faktor-faktor Kunci Keberhasilan

Guna mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan Lingkungan Strategis berpengaruh cukup menentukan, yang berdasarkan analisis SWOT (Strengths /kekuatan, Weaknesses / kelemahan, Opportunities / peluang dan Threats / hambatan) adalah sebagai berikut :

1) Strengths (Kekuatan) meliputi :

- a. Komitmen Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun beserta segenap pihak yang terlibat dalam institusi Pengadilan Tinggi
- b. Sumber Daya manusia yang cukup memadai;
- c. Koordinasi Internal yang cukup mantap;
- d. Adanya Standard Operating Procedure (SOP) dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi (TUPOKSI);

2) Weaknesses (kelemahan) meliputi :

- a. Kemampuan dan keterampilan pegawai yang belum merata ;
- b. Belum meratanya volume pekerjaan tiap personil ;
- c. Pengolahan data yang belum tertata secara baik ;
- d. Pemahaman pegawai terhadap tata kerja dan prosedur belum merata;



- e. Orientasi kerja masih berpaku pada orientasi lama ;
 - f. Kurangnya pemahaman terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI).
- 3) Opportunities (peluang) meliputi :
- a. Adanya peraturan perundangan untuk landasan peradilan;
 - b. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ;
 - c. Sudah adanya mekanisme kerja yang memadai ditinjau dari peraturan yang ada;
 - d. Sudah adanya Rangsangan Lingkungan kerja yang diberikan atasan;
- 4) Threats (hambatan) meliputi :
- a. Terbatasnya sumber dana ;
 - b. Terbatasnya sarana dan prasarana;
 - c. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang ada.
 - d. Eselonisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun masih dirasakan sangat rendah jika dibandingkan dengan volume kerja dan tugasnya sebagai perpanjangan tangan Mahkamah Agung di tingkat kabupaten yang membawahi 3 (tiga) wilayah kabupaten/wilayah hukum.

Berdasarkan analisis SWOT maka sebagai faktor pendorong dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah Strengths (kekuatan) dan opportunities (peluang) dan faktor penghambatnya adalah Weaknesses (kelemahan) dan Threats (hambatan). Guna memanfaatkan faktor pendorong dan mengatasi faktor penghambat telah dilakukan antara lain :

- 1) Mengupayakan perbaikan sistem pelayanan publik dengan meningkatkan profesionalisme ;
- 2) Melakukan konsolidasi kepada semua jajaran dan Satuan Kerja;
- 3) Melakukan harmonisasi Lingkungan Kerja yang baik antar sesama karyawan atau staf.
- 4) Mengupayakan ketransparansian dalam sistem pelayanan ;
- 5) Mengupayakan peningkatan kualitas dan kinerja aparatur ;



c) Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan Pengadilan Negeri PAngkalan Bun adalah untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan efisiensi dan efektivitas pengadilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) penyelenggaraan peradilan yang bersih, berwibawa dan mandiri kepada publik atau masyarakat khususnya pencari keadilan (client service) hingga terwujudnya visi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Hal tersebut diupayakan dengan Memanajemen Sumber Daya Manusia yang ada dan memanfaatkan teknologi informasi menuju terwujudnya salah satu prioritas reformasi yudisial Mahkamah Agung RI yaitu transparansi, akuntabilitas, dan akses terhadap informasi peradilan yang harus ditangani secara sistematis dan berkelanjutan.

Tugas Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagai salah satu Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman adalah Menerima, Memeriksa, Memutus, dan Menyelesaikan perkara pada tingkat banding baik perkara pidana maupun perkara perdata, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004.

Mengingat pentingnya pelaksanaan tugas pengadilan yang efektif dan efisien, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menyusun rencana strategis 2010 – 2014 dengan upaya dan langkah sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan perkara;
2. Peningkatan tertib administrasi perkara;
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM);
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice);
5. Peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.



d) Strategi Pencapaian Tujuan / Sasaran Strategis

Strategi pencapaian tujuan / sasaran strategis yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah sebagai berikut :

1) Kebijakan

a. Kebijakan Internal

- Membentuk kesatuan pandang, kesatuan persepsi dan kesatuan gerak langkah, dalam menghayati dan memahami setiap tugas dan tanggung jawab masing-masing
- Menumbuhkan dan meningkatkan disiplin diri serta kesadaran untuk memahami apa yang menjadi tugas dan apa yang harus dikerjakan.
- Menumbuhkan dinamika dan kreativitas bagi para hakim, pejabat struktural, pejabat fungsional, dan seluruh karyawan guna mewujudkan kewibawaan dan bertanggung jawab.
- Merespons sesegera mungkin permasalahan yang dialami / diajukan masyarakat pencari keadilan, yang terdapat dalam media informasi maupun pengaduan dari masyarakat
- Memberikan job description yang jelas pada setiap sub bagian dan setiap aparat peradilan
- Melakukan evaluasi secara termin / tiap bulan atas kinerja pada tiap unit kerja sub bagian.
- Membentuk tim yang solid dalam pengembangan sistem informasi pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bundan aksesibilitas publik.
- Melakukan rapat rutin yang diikuti semua unit atau kepaniteraan/urusan dan seluruh pegawai guna mengidentifikasi permasalahan-permasalahan, memberi masukan, solusi dan membentuk kesatuan pemahaman atau persepsi dan gerak langkah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab tiap personil / staf.



- Mencari alternatif solusi atas permasalahan-permasalahan yang didapat didalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- Melakukan diskusi di kalangan para Hakim Tinggi untuk mendapatkan pemecahan atas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan aspek-aspek teknis dan menampung usul-usul dan buah-buah pikiran yang berkembang dalam diskusi.
- Melakukan pengawasan internal

b. Kebijakan Eksternal

- Menciptakan hubungan kerja yang seimbang antar sesama penegak hukum
- Pengembangan aplikasi atau pemrograman software untuk keterbukaan informasi perkara yang handal
- Menciptakan hubungan yang serasi dengan sesama unsur Muspida tingkat kabupaten
- Meningkatkan kerukunan. hidup berumah tangga para Hakim, Pejabat Kepaniteraan dan Pejabat Kesekretariatan serta Karyawan dan Karyawati.
- Melakukan pembinaan hubungan masyarakat yang dapat membangun citra dan cita Pengadilan melalui Media Masa (pers, TV, dan radio)
- Menumbuhkembangkan semangat dan aktifitas aparat untuk mengikuti dan aktif dalam berbagai organisasi yaitu :
 - IKAHI
 - KORPRI
 - DHARMAYUKTI KARINI
 - IPASPI
 - KOPERASI PEGAWAI
 - ORGANISASI KEOLAHRAGAAN
 - PTWP.



- Menumbuhkembangkan Kepercayaan masyarakat terhadap Lingkungan Peradilan khususnya Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

e) Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun 2014

Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan Penyelesaian Perkara	a. Prosentase penyelesaian perkara yang diterima	95 %
		b. Prosentase penyelesaian sisa perkara yang tahun lalu	100 %
2.	Peningkatan Tertib Administrasi Perkara (Pidana dan Perdata)	a. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis	100 %
		b. Jumlah Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu	100 %
		c. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%
		d. Prosentasi Penyampaian Pemberitahuan Relaaas Putusan Tepat Waktu.	100 %
		e. Jumlah Penyampaian salinan putusan /Salinan Penetapan ke para pihak.	100 %
3.	Peningkatan Kualitas SDM	a. Jumlah pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100 %
		b. Jumlah pegawai yang lulus diklat non yudisial	100 %
4.	Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice)	Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan melalui website	80 %
5.	Peningkatan Dukungan Manajemen Peradilan dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Persentase pencapaian penyelenggaraan perkantoran.	98 %
6.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan melalui website	95 %



2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Dalam ranagka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MARSEL TF. SILLY, SH
Jabatan : Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : PUTUT TRI SUNARKO, SH., MH.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, 2 Januari 2014

Ketua
Pihak Pertama

PUTUT TRI SUNARKO, SH., MH
NIP. 19680318 199212 1 001

Panitera / Sekretaris
Pihak Pertama

MARSEL TF. SILLY, SH
NIP. 19590319 198103 1 003



PENETAPAN KINERJA

Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
Tahun Anggaran : 2014

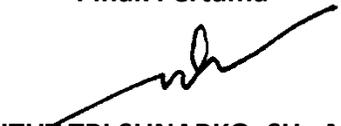
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan Penyelesaian Perkara	a. Prosentase penyelesaian perkara yang diterima	95 %
		b. Prosentase penyelesaian sisa perkara yang tahun lalu	100 %
2.	Peningkatan Tertib Administrasi Perkara (Pidana dan Perdata)	a. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis	100 %
		b. Jumlah Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu	100 %
		c. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%
		d. Prosentasi Penyampaian Pemberitahuan Relas Putusan Tepat Waktu.	100 %
		e. Jumlah Penyampaian salinan putusan /Salinan Penetapan ke para pihak.	100 %
3.	Peningkatan Kualitas SDM	a. Jumlah pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100 %
		b. Jumlah pegawai yang lulus diklat non yudisial	100 %
4.	Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice)	Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan melalui website	80 %
5.	Peningkatan Dukungan Manajemen Peradilan dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Persentase pencapaian penyelenggaraan perkantoran.	98 %
6.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan melalui website	95 %

Jumlah Anggaran : Rp.3.567.146.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)

Pangkalan Bun, 2 Januari 2014

Ketua

Pihak Pertama


PUTUT TRI SUNARKO, SH., MH
NIP. 19680318 199212 1 001

Panitera / Sekretaris

Pihak Pertama


MARSEL TF. SILLY, SH
NIP. 19590319 198103 1 003



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tahun 2013 dilakukan dengan cara membandingkan antara target capaian tahun 2013 yang ada dalam Dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran di tahun 2013. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada table berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan Penyelesaian Perkara	a. Prosentase penyelesaian perkara yang diterima	95 %
		b. Prosentase penyelesaian sisa perkara yang tahun lalu	100 %
2.	Peningkatan Tertib Administrasi Perkara (Pidana dan Perdata)	a. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis	100 %
		b. Jumlah Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu	100 %
		c. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%
		d. Prosentasi Penyampaian Pemberitahuan Relaaas Putusan Tepat Waktu.	100 %
		e. Jumlah Penyampaian salinan putusan /Salinan Penetapan ke para pihak.	100 %
3.	Peningkatan Kualitas SDM	a. Jumlah pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100 %
		b. Jumlah pegawai yang lulus diklat non yudisial	100 %
4.	Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice)	Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan melalui website	80 %
5.	Peningkatan Dukungan Manajemen Peradilan dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Persentase pencapaian penyelenggaraan perkantoran.	98 %
6.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan melalui website	95 %



Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2014 ini. Dari 6 (enam) sasaran strategis yang diuraikan dalam Penetapan Kinerja 2014 dan 12 (duabelas) indikator kinerja tersebut yang belum berhasil diwujudkan dilakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang.

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pada akhir tahun 2014, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut:

PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu Jumlah penyelesaian perkara yang diterima sesuai dengan SOP yang ditetapkan dan Jumlah sisa perkara yang diselesaikan.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Peningkatan Penyelesaian Perkara	a. Prosentase penyelesaian perkara yang diterima	95%	96,8 %	96,8 %
		b. Prosentase penyelesaian sisa perkara tahun lalu	100%	100 %	100 %

1. Indikator Kinerja Prosentase perkara yang diselesaikan yang ditargetkan 95% telah tercapai 96,8 %, artinya perkara yang telah diregistrasi pada tahun 2014 telah diminutasi sebanyak 96,8 %. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Jumlah Perkara yang masuk selama tahun 2014 sebanyak 376 perkara terbagi pidana 341 perkara dan perdata 35 perkara, sedangkan yang sudah putus dan minutasikan berjumlah 364 perkara. Sehingga persentase capaian tahun 2014 adalah berjumlah 96,8 %. Dalam memberikan penilaian terhadap indikator kinerja perkara yang diselesaikan, yaitu dengan melakukan perbandingan antara jumlah perkara yang masuk, baik pidana maupun perdata dengan jumlah perkara yang selesai. Dimana sumber data yang digunakan adalah Laporan bulanan dan laporan tahunan.

2. Indikator Kinerja Prosentase sisa perkara yang diselesaikan yang ditargetkan 100% telah tercapai 100%, artinya perkara yang tersisa pada tahun 2013 telah diselesaikan pada tahun 2014. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:
 Dalam memberikan penilaian terhadap indikator kinerja sisa perkara yang diselesaikan, yaitu dengan melakukan perbandingan antara jumlah sisa perkara dengan jumlah sisa perkara yang diminutasikan, baik pidana maupun perdata. Dimana sumber data yang digunakan adalah Laporan bulanan dan laporan tahunan.

Pada tahun 2013, sisa perkara yang belum putus 69 perkara, dan telah diselesaikan ditahun 2014 sehingga Persentasenya adalah 100 %.

PENINGKATAN TERTIB ADMINISTRASI PERKARA

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 5 (lima) indikator kinerja dan capaian kerjanya pada tahun 2014 dapat terlihat pada table berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Peningkatan Tertib Administrasi Perkara	a. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis	100 %	100 %	100 %
		b. Prosentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %
		c. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara	100 %	100 %	100 %



		lengkap			
		d. Prosentase Penyampaian Pemberitahuan Relas Putusan Tepat Waktu.	100 %	100 %	100 %
		e. Prosentase Penyampaian salinan putusan /Salinan Penetapan ke para pihak.	100 %	100 %	100 %

1. Indikator Kinerja Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke majelis yang ditargetkan 100% telah tercapai 100%, artinya berkas perkara yang telah deregister telah disidangkan pada tahun 2014. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Dalam tahun 2014 terdapat 376 jumlah perkara dan telah diregister dan telah disampaikan ke majelis, sehingga realisasi kinerja ini 100 %.

2. Indikator Prosentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu yang ditargetkan 100% telah tercapai 100%, artinya pemanggilan sidang telah disampaikan keseluruhan tepat waktu. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Dalam tahun 2014 terdapat 213 penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang oleh jurusita dan berhasil disampaikan tepat waktu, sehingga realisasi kinerja ini 100 %.

3. Indikator Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap yang ditargetkan 100% telah tercapai 100%, artinya pengajuan banding, kasasi dan PK telah disampaikan secara lengkap dan memenuhi tenggang waktu yang ditentukan. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Ditahun 2014 terdapat 25 perkara banding dan 16 perkara kasasi sementara perkara yang PK 1 perkara. Seluruh perkara banding dan kasasi telah diproses sesuai tenggang waktu pengajuan yang ditentukan, sehingga kinerja indikator ini 100 %.



4. Indikator Prosentase Penyampaian Pemberitahuan Relas Putusan Tepat Waktu yang ditargetkan 100% telah tercapai 100%, artinya sejumlah relas putusan yang ada telah memenuhi tenggang waktu yang ditentukan. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut

Ditahun 2014 terdapat 23 relas putusan dan seluruhnya telah disampaikan sesuai tenggang waktu yang ditentukan sehingga kinerja indicator ini mencapai 100 %.

5. Indikator Prosentase penyampaian salinan putusan/salinan penetapan ke para pihak yang ditargetkan 100% telah tercapai 100%, artinya semua penyampaian salinan putusan/salinan penetapan ke para pihak memenuhi tenggang waktu yang ditentukan. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Ditahun 2014 terdapat 30 penyampaian salinan putusan/salinan penetapan ke para pihak seluruhnya telah disampaikan sesuai tenggang waktu yang ditentukan sehingga kinerja indikator ini mencapai 100 %.

PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dan prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Peningkatan Kualitas SDM	a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100 %	100%	100%
		b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	100 %	100%	100%

1. Indikator Kinerja Prosentase pegawai yang lulus diklat yudisial yang ditargetkan 100% terealisasi, artinya direncanakan akan hakim/pegawai



yang akan mengikuti diklat ditahun 2014 dan terealisasi 1 orang hakim yang mengikuti diklat Sertifikasi Hakim lingkungan hidup bagi hakim tingkat pertama dan banding peradilan TUN seluruh Indonesia dan dinyatakan lulus yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni s.d 26 Juni 2014.

2. Sementara itu Indikator kinerja prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial ditargetkan 100% terealisasi, artinya direncanakan akan ada hakim/pegawai yang mengikuti diklat ditahun 2014 dan terealisasi 1 orang pegawai yang mengikuti diklat Prajabatan dan dinyatakan lulus yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret s.d 26 Maret 2014.

Dalam memberikan penilaian terhadap indikator kinerja pegawai yang lulus non yudisial, yaitu dengan melakukan perbandingan antara sumber daya manusia non teknis yang diajukan untuk mengikuti sehingga memperoleh kelulusan/sertifikat dengan jumlah yang mengikuti diklat. Dimana sumber data yang digunakan adalah Laporan bulanan dan laporan tahunan.

Pada di tahun 2014, sumber daya manusia (SDM) Non teknis untuk Pengadilan Negeri Pangkalan Bun hanya mengikuti mengikuti diklat pra jabatan sebanyak 1 orang pegawai.

Sementara itu pelatihan diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada tahun 2014 tidak ada yang mengikuti terbentur persyaratan peserta harus minimal berpendidikan sarjan strata 1 dari bagian kesekretariatan, sedangkan dari bagian kepaniteraan tidak mengikuti karena keinginan fokus berkarir pada jabatan kepaniteraan.



PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN (ACCES TO JUSTICE)

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4.	Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice)	Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan melalui website	80%	16%	16%

1. Indikator Kinerja Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan yang ditargetkan 80 % telah tercapai 16 %, Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Dalam memberikan penilaian terhadap indikator kinerja proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan, yaitu dengan melakukan perbandingan antara jumlah proses putusan perkara yang sudah diminutasi dan dapat didownload di website direktori putusan Mahkamah Agung RI (www.putusan.mahakamah.go.id/pengadilan/pn-pangkalan-bun) sesuai dengan SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dengan jumlah perkara yang diputus. Publikasi putusan perkara ditahun 2014 tidak terpublikasi dikarenakan jumlah SDM yang sangat minim sehingga sumber daya lebih terfokus melaksanakan tugas kewajiban kepaniteraaran dan kesekretariatan. Namun website Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menggunakan Case Tracking System (CTS) ditahun 2014 dan entri data telah dilaksanakan oleh masing-masing bagian sesuai dengan tugasnya.



PENINGKATAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERADILAN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Prosentase penyelesaian penyelenggaraan perkantoran. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
5.	Peningkatan Dukungan Manajemen Peradilan dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Prosentase penyelesaian penyelenggaraan perkantoran	100%	99%	99%

1. Indikator Kinerja Prosentase penyelesaian penyelenggaraan perkantoran yang ditargetkan 100 % telah tercapai 99 %, Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Ditahun 2014 Peningkatan dukungan manajemen peradilan dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dilingkungan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yaitu dianggarkan senilai Rp.3.531.226.000,- (Tiga milyar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah), telah terlaksana sesuai mekanisme perbendaharaan negara yang berlaku senilai Rp. 3.527.474.065,- (Tiga milyar lima ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam puluh lima rupiah), maka kinerja untuk indikator ini 99,89 %.

PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan melalui website. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
5.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Prosentase proses penyelesaian penyelenggaraan dukungan teknis peradilan	100%	85%	85%

1. Indikator Kinerja Prosentase penyelesaian penyelenggaraan dukungan teknis peradilan yang ditargetkan 100 % telah tercapai 85 %, Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Ditahun 2014 Peningkatan manajemen peradilan umum dilingkungan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yaitu dianggarkan senilai Rp.45.920.000,- (Empat puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), telah terlaksana sesuai mekanisme perbendaharaan negara yang berlaku senilai Rp.39.082.881,- (Tiga puluh sembilan juta delapan puluh dua ribu delapan ratus delapan satu rupiah) dan kinerja untuk indikator ini 85 %.



BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) tahun 2014 yang memuat laporan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun selama kurun waktu tahun 2014 yang dituangkan menjadi 6 (enam) target sasaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabelnya lembaga peradilan, karena pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Pangkalan Bun ini melaporkan suatu capaian kinerja (Performance Result) selama tahun 2013 dibandingkan dengan rencana kerja (Performance Plan) yang mengacu pada Rencana Strategis (Strategic Plan) Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tahun 2010-2014.

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tahun 2013 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja lembaga Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagai institusi yang berada di bawah Mahkamah Agung yang lebih beribawa, mandiri dan hasil putusannya yang lebih mencerminkan rasa keadilan.

Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi, terencana, tersistematis dan terprogram secara komprehensif.

Dengan diterbitkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tahun 2013, diharapkan bisa terlihat kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun secara transparan dan akuntabel sehingga bisa menjadi patokan pencapaian kinerja lembaga Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tahun yang akan datang.

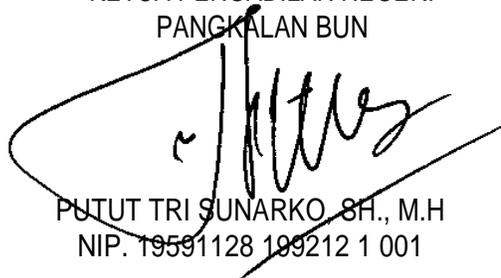


B. Saran

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara pada seluruh tingkat peradilan di empat lingkungan peradilan.
2. LAKIP sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan LAKIP sebagai alat evaluasi kinerja bagi instansi kami.
3. Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan LAKIP, merupakan instrument objektif yang tidak berpihak
4. Kelayakan LAKIP sebagai instrument punish and reward merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrument lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LAKIP) yang harus optimal.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tahun 2014 ini dibuat sebagai panduan peningkatan kinerja di tahun-tahun mendatang.

KETUA PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN



PUTUT TRI SUNARKO, SH., M.H
NIP. 19591128 199212 1 001

PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN



WAHDAN, SH.
NIP. 19730602 199403 1 007